



RENCANA KERJA (RENJA)

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan di daerah berjalan dengan baik, mencapai sasaran, serta berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi setelah RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 115);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dalam periode 1 (satu) Tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dengan mengacu dari RKPD Tahun 2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
- (2) Kedudukan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam penyusunan RKA.
- (3) Sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Penutup.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:
 1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - a. RSUD Doris Sylvanus;
 - b. RSJ Kalawa Atei; dan
 - c. RSUD Hanau.
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
 5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
25. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
27. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
29. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
30. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
32. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah;
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
34. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
35. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan

36. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:

- a. Biro Administrasi Pimpinan;
- b. Biro Kesejahteraan Rakyat;
- c. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Perekonomian;
- f. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
- g. Biro Administrasi Pembangunan;
- h. Biro Organisasi; dan
- i. Biro Umum.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Juli 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 20 Juli 2025

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

LEONARD S. AMPUNG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 19691025 199603 1 003

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Palangka Raya, Oktober 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Provinsi
Kalimantan Tengah,



BARU S.Pd., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .. 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian
Renstra PD 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah 19

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 32

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 32

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 32

3.3 Program dan Kegiatan 34

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 45

BAB V PENUTUP 55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaannya lebih lanjut diatur ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam peraturan dimaksud diamanatkan bahwa Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Renja PD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan PD.

Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang disusun untuk periode Tahun 2026 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) PD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, sehingga penyusunan Renja PD dilakukan secara silmutan/paralel dengan Penyusunan Rancangan Awal RKPD.

Renja PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah disusun agar dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama dalam tahun anggaran 2026 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian akan dapat memberikan gambaran tentang arah dan tujuan program, target kinerja yang akan dicapai serta kegiatan pelayanan sosial yang akan dilaksanakan.

Penyusunan Renja PD merupakan proses awal dari penyusunan perencanaan program dan anggaran PD yang akan terkait dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, sehingga program dan kegiatan yang tertuang di dalam Renja PD akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Pembangunan Kalimantan Tengah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
 25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan Program Tahun Anggaran 2026, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran.

2. Tujuan

- a. Memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2026.
- b. Merencanakan target dan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 ini, disusun terdiri dari 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, terdiri dari evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, terdiri dari telaahan terhadap kebijakan nasional, dan tujuan dan sasaran Renja PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat uraian tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif, dan sumber dana dari program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan.

BAB V PENUTUP memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Pada Tahun Anggaran 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mengelola anggaran sebesar **Rp. 26.979.343.230,-** (Dua puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Belanja Operasi **Rp. 26.432.235.017,-** (Dua puluh enam milyar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh belas rupiah) dan Belanja Modal **Rp. 547.108.213,-** (Lima ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah).

Adapun tingkat Capaian dan Realisasi anggaran dimaksud adalah sebagai berikut :

Dana APBD Provinsi

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.858.343.230	23.733.593.562	95,48	100,00
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	284.740.000	280.740.000	98,40	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	49.918.244	99,84	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	14.992.774	99,95	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	9.976.700	99,77	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	14.994.452	99,96	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	13.150.000	13.063.145	99,34	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.000.000	84.900.868	99,88	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.590.000	92.345.439	95,61	100,00
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	12.303.647.336	11.304.003.560	91,88	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.273.647.336	11.274.056.657	91,86	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	9.994.382	99,94	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.000.000	19.952.521	99,76	100,00
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	80.000.000	79.730.000	99,66	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.000.000	79.730.000	99,66	100,00
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.721.710.143	1.718.647.030	99,82	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.000.000	54.991.866	99,99	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	351.181.625	350.219.243	99,73	100,00

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Rp	%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000	69.985.802	99,98	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.025.528.518	1.203.552.549	99,81	100,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	120.000.000	119.897.570	99,91	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.632.992.141	9.521.919.509	98,85	100,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	11.995.000	99,96	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	263.272.141	172.396.016	65,48	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.357.720.000	9.337.528.493	99,78	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	835.253.610	829.101.841	99,26	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	430.000.000	427.015.233	99,31	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.000.000	124.985.000	99,99	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	280.253.610	277.101.608	98,88	100,00
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.121.000.000	1.017.368.278	98,50	100,00
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.543.000.000	1.537.609.532	99,65	100,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	100.000.000	99.789.978	99,79	100,00
	Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	43.000.000	42.017.700	97,72	100,00
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	690.000.000	689.155.659	99,88	100,00
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	301.714.470	300.760.184	99,68	100,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	250.000.000	247.888.811	99,16	100,00
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	158.285.530	157.997.200	99,82	100,00
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	354.300.000	334.244.310	94,34	100,00
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	125.000.000	121.639.379	97,31	100,00

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Rp	%	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	110.550.000	108.443.735	98,09	100,00
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	118.750.000	104.161.196	87,71	100,00
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	223.700.000	217.233.845	97,11	100,00
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	155.000.000	153.931.260	99,31	100,00
	Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	68.700.000	63.302.585	92,14	100,00
	JUMLAH	26.979.343.230	25.822.681.249	95,71	100,00

Secara keseluruhan, target pelaksanaan Renja Tahun 2024 khususnya yang bersumber dari dana APBD untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat tercapai, dan dapat diketahui dari pencapaian Prosentase Penyerapan Anggaran sebesar **95,71%** (Sembilan puluh lima koma tujuh puluh satu persen) dan Prosentase fisik mencapai **100,00 %** (Seratus persen).

Sehingga beberapa kegiatan terdapat sisa anggaran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.124.749.668,-** (Satu milyar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) atau **4,52 %** (empat koma lima puluh dua persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 4.548.378,-** (Empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau **1,60 %** (nol koma enam puluh persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 999.643.776,-** (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) atau **8,12 %** (delapan koma dua belas persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 270.000,-** (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau **0,34 %** (nol koma tiga puluh empat persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 3.063.113,-** (Tiga juta enam puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah) atau **0,18 %** (nol koma delapan belas persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 111.072.632,-** (Seratus sebelas juta tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) atau **1,15%** (satu koma lima belas persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 6.151.769,-** (Enam juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) atau **0,74 %** (nol koma tujuh puluh empat persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 31.912.313,-** (Tiga puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah) atau **1,50 %** (satu koma lima puluh persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 5.390.468,-** (Lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) atau **0,35 %** (nol koma tiga lima persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
- b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 20.055.690,-** (Dua puluh juta lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) atau **5,66 %** (lima koma enam puluh enam persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 6.466.155,-** (Enam juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah) atau **0,69 %** (nol koma enam puluh sembilan persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang semaksimal mungkin sesuai dengan pagu anggaran yang sudah tersedia.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024

Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	
					Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase keterlaksanaan	100%	-						
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penanganan, dan Penanganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	100%	-						
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	8 dokumen	80
1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	4 dokumen	80
1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	4 dokumen	80
1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	4 dokumen	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	
					Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	4 dokumen	80
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 dokumen	10 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen/ laporan	16 dokumen	80
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen/ laporan	2 dokumen	80
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu	100%							
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	400 orang	133 orang	80 orang	76 orang	95	80 orang	209 orang	52,25
1.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	4 laporan	80
1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	10 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen (laporan)	8 dokumen (laporan)	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	
					Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
		SKPD								
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%							
1.05.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen		100	-	4 dokumen	80
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	-						
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	400 paket	80 paket	80 paket		100	80 paket	80 paket	20
1.05.01.1.05.09	Pelatihan dan Pendidikan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250 orang	150 orang	50 orang		100	-	100 orang	40
1.05.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 orang	150 orang	50 orang		100	-	100 orang	40
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	100%							
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 jenis	15 jenis	5 jenis		100	5 jenis (paket)	20 jenis (paket)	80
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 jenis	18 jenis	6 jenis		100	6 jenis	24 jenis	80
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	35 jenis	21 jenis	7 jenis		100	7 jenis	28 jenis	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	
					Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Pengandaan	yang Disediakan		5						
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bacaan koran bagi pegawai	15 jenis	9 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	12 jenis	80
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 jenis	60 jenis	20 jenis	20 jenis	100	20 jenis	80 jenis	80
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	4 tahun	80
1.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	4 dokumen	80
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%							
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 surat/paket	300 surat/paket	100 surat/paket	100 surat/paket	100	100 surat/paket	400 surat/paket	80
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 rekening	9 rekening	3 rekening	3 rekening	100	3 rekening	12 rekening	80
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 jenis	6 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	8 jenis	80
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%							
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa	Perarangan Dinas atau	120 unit	60 unit	20 unit	20 unit	100	20 unit	80 unit	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	
					Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
		Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Ditayarkan Pajaknya								
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 jenis	9 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	12 jenis	80
1.05.01.1.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	6 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	8 unit	80
1.05.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah provinsi	100%	-						
1.05.02.1.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	100%	-						
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	70 Kab/Kota	42 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	56 Kab/Kota	80
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	4 dokumen	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	
					Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1	2	3	4	5						
	Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penegakan Perda dan Perkada								
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sistem keamanan lingkungan dan deteksi dini kemungkinan timbulnya gangguan kantibmas dan bencana	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	4 dokumen	80
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	70 Kab/Kota	42 Kab/Kota -	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	56 Kab/Kota	80
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	20 kegiatan	12 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100	4 kegiatan	16 kegiatan	80
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Pemberitaan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Pemberitaan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	70 Kab/Kota	42 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	56 Kab/Kota	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	
					Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1.05.02.1.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani	100%	-						
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	-	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	28 Kab/Kota	40
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70 Kab/Kota	42 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	56 Kab/Kota	80
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	70 Kab/Kota	42 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	56 Kab/Kota	80
1.05.02.1.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani	100%	-						
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	5 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	4 laporan	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	
					Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Realisasi Capaian Prog. s/d Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)	
1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Terlaksananya pemberkasan administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	70 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	56 Kab/Kota	80	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat disampaikan beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kinerja pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain sebagai berikut yaitu :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan, antara lain :

- a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;
 - 2) Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - 3) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 4) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
 - 5) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - 6) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - 2) Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - 3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
 - 1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;
 - 2) Dukungan Operasional Sekretariat PPNS.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
 - b. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
 - c. Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
 - f. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi;
- 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
 - b. Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan pelayanan sebagai unsur staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

1. Memberikan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah.
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban masyarakat
3. Melakukan Pemeriksaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Memberikan Pembinaan disiplin dalam rangka menertibkan dan menindak warga masyarakat yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.
5. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
7. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah.

b. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan

Dalam pelaksanaan Analisa identifikasi lingkungan internal dan Analisa identifikasi lingkungan Eksternal pada Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dengan pendekatan S W O T, yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat KEKUATAN (Strength) dan KELEMAHAN (Weakness) yang akan dilakukan, apa yang menjadi PELUANG (OPPORTUNITIES) dan TANTANGAN (THREATS) Dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal.

a) Kekuatan (Strength)

- 1) Dasar Hukum Keberadaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Komitmen Masyarakat yang anti KKN dan Akuntabilitas Publik ;

- 3) Tersedianya kualitas SDM Aparatur Polisi Pamong Praja di Provinsi, Kabupaten, Kota se - Kalimantan Tengah ;
 - 4) Tersedianya dukungan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja yang memadai ;
 - 5) Terjalannya kondisi dan hubungan kemitraan dengan POLRI, Kabupaten/Kota, Kiai, Ulama dan Tokoh Masyarakat se-Kalimantan Tengah ;
 - 6) Terjalannya kerja sama dengan Aparatur Keamanan (POLRI) dan instansi terkait untuk terciptanya situasi Kalimantan Tengah yang kondusif ;
 - 7) Tingginya kesadaran sikap dan budaya terbuka masyarakat Kalimantan Tengah.
- b) Kelemahan (Weakness).
- 1) Keterlambatan penetapan/kurangnya Peraturan Pemerintah/Protap Tentang Polisi Pamong Praja ;
 - 2) Belum mantapnya materi (Silabi) secara jelas mengenai pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja ;
 - 3) Belum Optimalnya tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Operasional lapangan Trantibum ;
 - 4) Belum Optimalnya dedikasi dan loyalitas SDM Polisi Pamong Praja terhadap Tugas ;
 - 5) Anggota Polisi Pamong Praja masih ada yang belum mengikuti Pelatihan dan Pendidikan PPNS dan DIKLAT Polisi Pamong Praja;
 - 6) Pelaksanaan Tugas Polisi Pamong Praja di lapangan yang masih belum sesuai dengan Prosedur tetap (PROTAP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
 - 7) Kurangnya kerjasama sosial dan meningkatnya penduduk miskin.
 - 8) Padatnya jumlah penduduk dan penyerapan angkatan kerja yang kurang di Kalimantan Tengah.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Meningkatnya tingkat pendidikan ;
- 2) Mantapnya kerukunan warga masyarakat ;
- 3) Kehidupan Masyarakat yang semakin demokratis diharapkan akan mendorong terciptanya kondisi keamanan yang tertib, aman dan tenteram ;

- 4) Adanya semangat reformasi dan paradigma baru ;
- 5) Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dan partisipasi masyarakat ;
- 6) Tumbuh kesempatan yang luas untuk berprasaangka mengambil keputusan ;
- 7) Terjadinya hubungan dengan aparaturnya POLRI (Eksekutif dan Yudikatif), Dinas dan Badan, serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

b. Ancaman (Threats)

- 1) Pengaruh Negatif dengan adanya persaingan Era Globalisasi ;
- 2) Tuntutan Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance) ;
- 3) Tuntutan Kualitas dan Kuantitas pelayanan Publik ;
- 4) Kontrol sosial semakin meningkat ;
- 5) Lemahnya Koordinasi ;
- 6) Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana hasil pembangunan yang merata akan dapat meningkatkan mobilitas kejahatan ;
- 7) Krisis ekonomi multi dimensi dapat menyebabkan naiknya tingkat kejahatan di masyarakat ;
- 8) Terbatasnya Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta dalam penerimaan tenaga kerja ;
- 9) Terputusnya sektor usaha perdagangan dan pabrik-pabrik pada kota / lokasi tertentu ;
- 10) Krisis ekonomi multi dimensi yang belum juga pulih sehingga dapat menyebabkan naiknya tingkat kejahatan di masyarakat.

c. Analisis Strategis dan Pilihan

Setelah dipilih dan ditetapkan Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dari analisa identifikasi lingkungan eksternal tersebut maka diperoleh suatu kesimpulan Asumsi Analisa SWOT sebagai berikut :

1. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Perlu adanya penyamaan persepsi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja oleh seluruh aparaturnya penyelenggara pemerintah dan masyarakat.
3. Perlu tersedianya SDM aparaturnya yang berkualitas dan Profesional.
4. Perlu adanya semangat kerja dan disiplin yang tinggi bagi setiap aparaturnya penyelenggara Pemerintahan.

5. Perlu tersedianya anggaran dan sarana prasarana kerja yang cukup.
6. Perlu peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan simplifikasi Program penanganannya.
7. Perlu penataan kewenangan penanganan Trantibum dan Penegakan Perda.

Dengan demikian maka, lingkungan strategis tersebut, sangat mempengaruhi tingkat kelancaran dan menunjang tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah termasuk didalamnya akan mempengaruhi apakah peningkatannya sarana dan prasarana serta peningkatan kinerja aparaturnya Polisi Pamong Praja akan meningkatkan dengan kondisi ketenteraman dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Tengah yang kondusif dengan mewujudkan Good Governance dapat dilaksanakan dengan baik.

d. Dampak Terhadap Visi dan Misi Pembangunan Provinsi

Menyebabkan target yang ingin di capai dalam jangka waktu tertentu, tidak dapat dicapai sesuai rencana. Hal ini dapat diukur dengan capaian target SPM yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

e. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat mencapai hasil yang optimal sangat ditentukan oleh beberapa faktor pendukung serta penunjang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Sarana dan Prasarana Operasional di lapangan

Faktor sarana dan prasarana pendukung operasional di lapangan mempunyai peranan yang cukup penting serta signifikan dalam upaya pencapaian hasil yang lebih optimal, disamping itu dengan terpenuhinya sarana prasarana dan perlengkapan operasional di lapangan akan memberikan semangat lebih serta etos kerja yang diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Sarana dan Prasarana dimaksud diatas meliputi :

- a) Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2.
- b) Perlengkapan Personil yang memadai dan sesuai dengan ketentuan serta prosedur tetap (Protap) Satuan Polisi Pamong Praja.
- c) Pemberian Insentif yang memadai sesuai dengan unsur resiko yang dibebankan kepada personil Satpol PP.

2. Pembiayaan yang bersumber dari dana APBD perlu ditingkatkan sehingga bisa melaksanakan keseluruhan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja melalui berbagai program dan kegiatan yang selama ini belum dilaksanakan agar lebih mendekati kebutuhan ideal dari perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Peningkatan kapasitas serta kuantitas dari personil Satuan Polisi Pamong Praja yang ideal untuk lingkup Provinsi sebagai rujukan untuk Satpol PP Kota Palangka Raya mempunyai jumlah personil Satpol PP sebanyak 197 orang, sedangkan kondisi saat ini untuk Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan memiliki anggota berjumlah 328 terdiri dari PNS 60 orang dan Tenaga Kontrak 268 orang personil Satpol PP.
4. Kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas, sehingga kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan. Bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 adalah seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan pada Renja Tahun 2026 adalah:

- Jumlah Program : 3 program.
- Jumlah Kegiatan : 13 kegiatan.
- Jumlah Sub Kegiatan : 49 sub kegiatan.
- Pagu indikatif : Rp. 38.990.385.948,56,-.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah Cakupan pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi dengan target capaian tahun 2026 sebesar 100 %.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan aspek indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani, target capaian 100 %.
2. Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani, target capaian 100 %.

Pagu Indikatif rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 4.746.073.579,- untuk kegiatan rutin (Sekretariat dan 5 Bidang Teknis), ditambah untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK) sebesar Rp. 34.244.312.370,- sehingga total Pagu Indikatif rancangan akhir RKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 38.990.385.949,-. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama PD : Satuan Polisi Pamong Praja

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Usuran Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				38.990.385.948.56	Usuran Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				49.936.812.369.98	
	Usuran Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				38.990.385.948.56	Usuran Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				49.936.812.369.98	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Keterlaksanaan	100	36.902.447.857.56	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Keterlaksanaan	100	45.046.812.369.98	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	100	210.000.000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	100	265.000.000.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	20.000.000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	20.000.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	20.000.000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	20.000.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	20.000.000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	20.000.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	20.000.000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	20.000.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	20.000.000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	20.000.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	30.000.000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	65.000.000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatorif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketrampilan dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 laporan	80.000.000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketrampilan dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 laporan	100.000.000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu	100	34.279.312.369.98	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu	100	34.279.312.369.98	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota P.Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	371 orang/bulan	34.244.312.369.98	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota P.Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	371 orang/bulan	34.244.312.369.98	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	15.000.000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	15.000.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 dokumen	20.000.000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 dokumen	20.000.000.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	15.000.000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	15.000.000.00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	15.000.000.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	15.000.000.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	60.000.000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	650.000.000.00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota P.Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	410 paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota P.Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	410 paket	575.000.000.00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	10.000.000.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	15.000.000.00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota P.Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 orang	50.000.000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota P.Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 orang	60.000.000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	100	982.603.070.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	100	1.700.000.000.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota P.Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 jenis	65.000.000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota P.Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 jenis	100.000.000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota P.Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	142.603.070.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota P.Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	500.000.000.00	

No	Rancangan Awal RKPD										Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota P.Raya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	70.000.000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota P.Raya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	75.000.000.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	50.000.000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	80.000.000.00	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	70.000.000.00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	75.000.000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	515.000.000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	750.000.000.00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	80.000.000.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	120.000.000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	4.000.000.000.00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota P.Raya	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota P.Raya	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	1.000.000.000.00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota P.Raya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota P.Raya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	3.000.000.000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	745.532.417.58	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	1.412.500.000.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	12.500.000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	12.500.000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	350.000.000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	400.000.000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	383.032.417.58	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1.000.000.000.00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100	600.000.000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100	2.725.000.000.00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota P.Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 unit	500.000.000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota P.Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 unit	600.000.000.00		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota P.Raya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	100.000.000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota P.Raya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	125.000.000.00		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota P.Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota P.Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2.000.000.000.00	
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan pelayanan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi	100	1.600.000.000.00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan pelayanan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi	100	4.200.000.000.00	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase gangguan keamanan, ketertarikan dan ketertiban umum yang ditangani	100	1.100.000.000.00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase gangguan keamanan, ketertarikan dan ketertiban umum yang ditangani	100	3.400.000.000.00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi Kalteng	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 dokumen	100.000.000.00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi Kalteng	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 dokumen	2.000.000.000.00	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	50.000.000.00	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	150.000.000.00	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Provinsi Kalteng	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	35 kasus	150.000.000.00	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Provinsi Kalteng	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	35 kasus	250.000.000.00	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Provinsi Kalteng	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	100 kasus	150.000.000.00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Provinsi Kalteng	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	100 kasus	250.000.000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	400.000.000.00	Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Kalteng	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	400.000.000.00	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Kota P.Raya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Pelindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 orang	250.000.000.00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota P.Raya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Pelindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 orang	350.000.000.00	
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani	100	300.000.000.00	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani	100	500.000.000.00	
	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 laporan	100.000.000.00	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 laporan	150.000.000.00	
	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	30 laporan	85.000.000.00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	30 laporan	150.000.000.00	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	14 laporan	115.000.000.00	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	14 laporan	200.000.000.00	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina	100	200.000.000.00	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina	100	300.000.000.00	
	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 laporan	50.000.000.00	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 laporan	100.000.000.00	
	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan transibum	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 laporan	150.000.000.00	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan transibum	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 laporan	200.000.000.00	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	487.938.091.00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	690.000.000.00	
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		Persentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	100%	407.938.091.00	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		Persentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	100%	540.000.000.00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Provinsi Kalteng	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi kebakaran yang sah dan legal	1 dokumen	60.000.000.00	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Provinsi Kalteng	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi kebakaran yang sah dan legal	1 dokumen	85.000.000.00	
	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Kalteng	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 dokumen	60.000.000.00	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Kalteng	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 dokumen	85.000.000.00	
	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi Kalteng	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	50 orang	80.000.000.00	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi Kalteng	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	50 orang	100.000.000.00	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	10 laporan	80.000.000.00	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	10 laporan	100.000.000.00	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Kalteng	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5 dokumen	62.938.091.00	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Kalteng	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5 dokumen	85.000.000.00	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Provinsi Kalteng	Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Informasi kebakaran dan Penyelamatan (SIKIP) nya Terintegrasi dengan Provinsi	14 Kab/Kota	65.000.000.00	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Provinsi Kalteng	Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Informasi kebakaran dan Penyelamatan (SIKIP) nya Terintegrasi dengan Provinsi	14 Kab/Kota	85.000.000.00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	80.000.000.00	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	150.000.000.00	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 laporan	40.000.000.00	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 laporan	75.000.000.00	
	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 laporan	40.000.000.00	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 laporan	75.000.000.00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada prinsipnya rancangan Rencana Kerja yang di buat tetap mengacu pada Program dan Kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan, kepentingan, dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yang di tuangkan dalam bentuk program antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- 2) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat (Musrenbang, pikir dan usulan tokoh masyarakat).

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Perangkat Daerah: Satpol PP dan Damkar

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana strategik daerah Kabupaten/Kota secara jelas belum tentu mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi, hal ini mengingat adanya perbedaan tingkat prioritas pembangunan daerah masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya dan disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah secara umum memiliki kaitan tugas dan fungsi yang baik, namun program dan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota sebagian besar memiliki kesamaan program dan kegiatan yang sifatnya berjenjang baik dari tingkat pusat maupun sampai ke daerah. Secara hirarki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berkoordinasi dan konsultasi baik dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah maupun dengan Ditjen Bina Administrasi dan Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Rencana Kerja Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi yang memerlukan dukungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah yaitu penerapan pelayanan publik di daerah, penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu, Rencana Kerja Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Tengah harus bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Tujuan dan Sasaran ini dibuat lebih riil dari misi dan diharapkan dapat menjadi pedoman melakukan langkah-langkah selanjutnya.

Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam rangka mewujudkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, yaitu :

a. Tujuan

Tujuan yang ingin diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada dalam Rangka Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Polisi Pamong Praja Agar Lebih Efektif, Handal, Tangguh dan Profesional.
3. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga, Instansi Terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Melaksanakan Deteksi Dini dan Pemetaan Wilayah Rawan Serta Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
5. Meningkatkan Kualitas Anggota Satlinmas Dalam Tanggap Darurat Bencana, Pam Swakarsa, Mendukung Pelaksanaan Pemilu /Pilkada dan Perlindungan Masyarakat.
6. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
7. Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang Memadai Guna Menunjang Kelancaran Tugas.

b. Sasaran

Adapun sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran tujuan dimaksud adalah:

- 1) Meningkatnya pendapatan asli daerah melalui penegakan Perda dan Perkada.
- 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas Polisi Pamong Praja.
- 3) Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga, Instansi Terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 4) Terlaksananya Deteksi Dini dan Pemetaan Wilayah Rawan Serta Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- 5) Meningkatnya kualitas Anggota Satlinmas dalam Tanggap Darurat Bencana, Pam Swakarsa, dan Perlindungan Masyarakat.
- 6) Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- 7) Siapnya sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran tugas.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 ditunjang dengan Belanja Langsung, yaitu Belanja Operasi (Belanja pegawai, belanja barang dan jasa), dan Belanja Modal (Belanja modal peralatan dan mesin, Belanja modal gedung dan bangunan).

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2026 bersumber dari dana APBD Provinsi. Program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi terdiri atas 3 (tiga) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan, dan 49 (empat puluh sembilan) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 38.990.385.948,56,- (Tiga puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma lima puluh enam rupiah).

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD.
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
	b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
	c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
	d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	e. Fasilitas Kunjungan Tamu.
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6.	g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.	b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
8.	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan.
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
B. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
9.	9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
	a. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.
	b. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
	c. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
	d. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.
	e. Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat.
	f. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
10.	10. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
	a. Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
	b. Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
11.	11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
	a. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
	b. Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum
C. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelemantan Non Kebakaran	

12.	Persentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
	a. Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
	b. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, c. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	d. Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota
	e. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
	f. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	g. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi
13.	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	a. Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	b. Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Adapun rumusan rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 akan disajikan pada Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Provinsi Kalimantan Tengah
 (Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				38.990.385.948.56				49.936.812.369.98
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keterlaksanaan		100	36.902.447.857.56			100	45.046.812.369.98
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu		100	210.000.000.00			100	265.000.000.00
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota P.Raya	2 dokumen	20.000.000.00	APBD		2 dokumen	20.000.000.00
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	20.000.000.00	APBD		1 dokumen	20.000.000.00
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	20.000.000.00	APBD		1 dokumen	20.000.000.00
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	20.000.000.00	APBD	1	1 dokumen	20.000.000.00

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	20.000.000.00	APBD		1 dokumen	20.000.000.00
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota P.Raya	4 laporan	30.000.000.00	APBD		4 laporan	65.000.000.00
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterlibatan dan Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kota P.Raya	1 laporan	80.000.000.00	APBD		1 laporan	100.000.000.00
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu		100	34.279.312.369.98			100	34.279.312.369.98
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota P.Raya	371 orang/bulan	34.244.312.369.98	APBD		371 orang/bulan	34.244.312.369.98
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	15.000.000.00	APBD		1 dokumen	15.000.000.00
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota P.Raya	2 dokumen	20.000.000.00	APBD		2 dokumen	20.000.000.00
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		100	15.000.000.00			100	15.000.000.00
1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota P.Raya	1 laporan	15.000.000.00	APBD		1 laporan	15.000.000.00

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		100	60.000.000.00			100	650.000.000.00
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota P.Raya	410 paket	-	APBD		410 paket	575.000.000.00
1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota P.Raya	1 dokumen	10.000.000.00	APBD		1 dokumen	15.000.000.00
1.05.01.1.05.0003	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota P.Raya	120 orang	50.000.000.00	APBD		120 orang	60.000.000.00
1.05.1.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan		100	992.603.070.00			100	1.700.000.000.00
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota P.Raya	5 jenis	65.000.000.00	APBD		5 jenis	100.000.000.00
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota P.Raya	10 paket	142.603.070.00	APBD		10 paket	500.000.000.00
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota P.Raya	7 paket	70.000.000.00	APBD		7 paket	75.000.000.00
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota P.Raya	2 dokumen	50.000.000.00	APBD		2 dokumen	80.000.000.00
1.05.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota P.Raya	1 laporan	70.000.000.00	APBD		1 laporan	75.000.000.00
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalteng	1 dokumen	515.000.000.00	APBD		1 dokumen	750.000.000.00
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	80.000.000.00	APBD		1 dokumen	120.000.000.00

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.1.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	-	APBD		100	4.000.000.000.00
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota P.Raya	4 unit	-	APBD		4 unit	1.000.000.000.00
1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota P.Raya	2 unit	-	APBD		2 unit	3.000.000.000.00
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100	745.532.417.58			100	1.412.500.000.00
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota P.Raya	1 laporan	12.500.000.00	APBD		1 laporan	12.500.000.00
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota P.Raya	1 laporan	350.000.000.00	APBD		1 laporan	400.000.000.00
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Kota P.Raya	1 laporan	383.032.417.58	APBD		1 laporan	1.000.000.000.00
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100	600.000.000.00			100	2.725.000.000.00
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pejaknya	Kota P.Raya	30 unit	500.000.000.00	APBD		30 unit	600.000.000.00
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota P.Raya	60 unit	100.000.000.00	APBD		60 unit	125.000.000.00
1.05.01.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota P.Raya	2 unit	-	APBD		2 unit	2.000.000.000.00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETERANGAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelayanan ketertarikan, keterlibatan umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi		100	1.600.000.000.00			100	4.200.000.000.00

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani		100	300.000.000.00			100	500.000.000.00
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	1 laporan	100.000.000.00	APBD		1 laporan	150.000.000.00
1.05.02.1.02.0010	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	30 laporan	85.000.000.00	APBD		30 laporan	150.000.000.00
1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Provinsi Kalteng	14 laporan	115.000.000.00	APBD		14 laporan	200.000.000.00
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina		100	200.000.000.00			100	300.000.000.00
1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Provinsi Kalteng	1 laporan	50.000.000.00	APBD		1 laporan	100.000.000.00
1.05.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan tranitibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keterliban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Provinsi Kalteng	1 laporan	150.000.000.00	APBD		1 laporan	200.000.000.00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100%	487.938.091.00			100%	690.000.000.00
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		100%	407.938.091.00			100%	540.000.000.00

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	Provinsi Kalteng	1 dokumen	60.000.000.00	APBD		1 dokumen	85.000.000.00
1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Aitar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Provinsi Kalteng	1 dokumen	60.000.000.00	APBD		1 dokumen	85.000.000.00
1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Provinsi Kalteng	50 orang	80.000.000.00	APBD		50 orang	100.000.000.00
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi Kalteng	10 laporan	80.000.000.00	APBD		10 laporan	100.000.000.00
1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Kalteng	5 dokumen	62.938.091.00	APBD		5 dokumen	85.000.000.00
1.05.04.1.01.0025	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi	Provinsi Kalteng	14 Kab/Kota	65.000.000.00	APBD		14 Kab/Kota	85.000.000.00

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		100%	80.000.000.00			100%	150.000.000.00
1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Kalteng	1 laporan	40.000.000.00	APBD		1 laporan	75.000.000.00
1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Kalteng	1 laporan	40.000.000.00	APBD		1 laporan	75.000.000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output,

outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
Meningkatkan Kemajuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persentase (%)
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase (%)

Kelompok Sasaran adalah sekumpulan sasaran yang mempunyai tujuan interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan program dalam kurun waktu yang ditentukan.

Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
**Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				38.990.385.948.56				49.936.812.369.98
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keterlaksanaan		100	36.902.447.857.56			100	45.046.812.369.98
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu		100	210.000.000.00			100	265.000.000.00
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota P. Raya	2 dokumen	20.000.000.00	APBD		2 dokumen	20.000.000.00
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota P. Raya	1 dokumen	20.000.000.00	APBD		1 dokumen	20.000.000.00
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota P. Raya	1 dokumen	20.000.000.00	APBD		1 dokumen	20.000.000.00
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota P. Raya	1 dokumen	20.000.000.00	APBD	1	1 dokumen	20.000.000.00
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota P. Raya	1 dokumen	20.000.000.00	APBD		1 dokumen	20.000.000.00

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota P. Raya	4 laporan	30.000.000.00	APBD		4 laporan	65.000.000.00
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterlibatan dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kota P. Raya	1 laporan	80.000.000.00	APBD		1 laporan	100.000.000.00
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu		100	34.279.312.369.98			100	34.279.312.369.98
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota P. Raya	371 orang/bulan	34.244.312.369.98	APBD		371 orang/bulan	34.244.312.369.98
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota P. Raya	1 dokumen	15.000.000.00	APBD		1 dokumen	15.000.000.00
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota P. Raya	2 dokumen	20.000.000.00	APBD		2 dokumen	20.000.000.00
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		100	15.000.000.00			100	15.000.000.00
1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota P. Raya	1 laporan	15.000.000.00	APBD		1 laporan	15.000.000.00
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		100	60.000.000.00			100	650.000.000.00
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Baserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Baserta Atribut Kelengkapan	Kota P. Raya	410 paket	-	APBD		410 paket	575.000.000.00

Kode (1)	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (3)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi (4)	Target Capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)	Sumber Dana (7)		Target Capaian Kinerja (9)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (10)
1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian	Kota P.Raya	1 dokumen	10.000.000.00	APBD		1 dokumen	15.000.000.00
1.05.01.1.05.0003	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota P.Raya	120 orang	50.000.000.00	APBD		120 orang	60.000.000.00
1.05.1.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan		100	992.603.070.00			100	1.700.000.000.00
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota P.Raya	5 jenis	65.000.000.00	APBD		5 jenis	100.000.000.00
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota P.Raya	10 paket	142.603.070.00	APBD		10 paket	500.000.000.00
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota P.Raya	7 paket	70.000.000.00	APBD		7 paket	75.000.000.00
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota P.Raya	2 dokumen	50.000.000.00	APBD		2 dokumen	80.000.000.00
1.05.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota P.Raya	1 laporan	70.000.000.00	APBD		1 laporan	75.000.000.00
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalteng	1 dokumen	515.000.000.00	APBD		1 dokumen	750.000.000.00
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	80.000.000.00	APBD		1 dokumen	120.000.000.00
1.05.01.1.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	-	APBD		100	4.000.000.000.00
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota P.Raya	4 unit	-	APBD		4 unit	1.000.000.000.00

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota P. Raya	2 unit	-	APBD		2 unit	3.000.000.000.00
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100	745.532.417.58			100	1.412.500.000.00
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota P. Raya	1 laporan	12.500.000.00	APBD		1 laporan	12.500.000.00
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota P. Raya	1 laporan	350.000.000.00	APBD		1 laporan	400.000.000.00
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Kota P. Raya	1 laporan	383.032.417.58	APBD		1 laporan	1.000.000.000.00
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100	600.000.000.00			100	2.725.000.000.00
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota P. Raya	30 unit	500.000.000.00	APBD		30 unit	600.000.000.00
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota P. Raya	60 unit	100.000.000.00	APBD		60 unit	125.000.000.00
1.05.01.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota P. Raya	2 unit	-	APBD		2 unit	2.000.000.000.00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi		100	1.600.000.000.00			100	4.200.000.000.00
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani		100	1.100.000.000.00			100	3.400.000.000.00
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi Kalteng	1 dokumen	100.000.000.00	APBD		1 dokumen	2.000.000.000.00

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kota P.Raya	1 laporan	50.000.000.00	APBD		1 laporan	150.000.000.00
1.05.02.1.01.0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Provinsi Kalteng	35 kasus	150.000.000.00	APBD		35 kasus	250.000.000.00
1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Provinsi Kalteng	100 kasus	150.000.000.00	APBD		100 kasus	250.000.000.00
1.05.02.1.01.0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota P.Raya	1 dokumen	400.000.000.00	APBD		1 dokumen	400.000.000.00
1.05.02.1.01.0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota P.Raya	50 orang	250.000.000.00	APBD		50 orang	350.000.000.00
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani		100	300.000.000.00			100	500.000.000.00
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	1 laporan	100.000.000.00	APBD		1 laporan	150.000.000.00
1.05.02.1.02.0010	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	30 laporan	85.000.000.00	APBD		30 laporan	150.000.000.00
1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Provinsi Kalteng	14 laporan	115.000.000.00	APBD		14 laporan	200.000.000.00

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina		100	200.000.000.00			100	300.000.000.00
1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Provinsi Kalteng	1 laporan	50.000.000.00	APBD		1 laporan	100.000.000.00
1.05.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keteriban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Provinsi Kalteng	1 laporan	150.000.000.00	APBD		1 laporan	200.000.000.00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100%	487.938.091.00			100%	690.000.000.00
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		100%	407.938.091.00			100%	540.000.000.00
1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	Provinsi Kalteng	1 dokumen	60.000.000.00	APBD		1 dokumen	85.000.000.00
1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Provinsi Kalteng	1 dokumen	60.000.000.00	APBD		1 dokumen	85.000.000.00
1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi Kalteng	50 orang	80.000.000.00	APBD		50 orang	100.000.000.00
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi Kalteng	10 laporan	80.000.000.00	APBD		10 laporan	100.000.000.00

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Kalteng	5 dokumen	62.938.091.00	APBD		5 dokumen	85.000.000.00
1.05.04.1.01.0025	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SIKIP) nya Terintegrasi dengan Provinsi	Provinsi Kalteng	14 Kab/Kota	65.000.000.00	APBD		14 Kab/Kota	85.000.000.00
1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		100%	80.000.000.00			100%	150.000.000.00
1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Kalteng	1 laporan	40.000.000.00	APBD		1 laporan	75.000.000.00
1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Kalteng	1 laporan	40.000.000.00	APBD		1 laporan	75.000.000.00

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun Anggaran 2026 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah berusaha merencanakan Program dan Kegiatan yang menjadi penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsinya. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah selama Tahun Anggaran 2026. Dengan berpedoman pada Rencana Kerja ini diharapkan ke depan, kualitas pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditingkatkan dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Palangka Raya, Oktober 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Provinsi
Kalimantan Tengah,



BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007